

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

NURMALA VIATAMA

NPM : 1621020571

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

NURMALA VIATAMA

Npm : 1621020571

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr.Drs.H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020 M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Nurmala Viatama
NPM : 1621020571
JURUSAN : Siyasah (Hukum Tata Negara)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN
WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MEWUJUDKAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

Nurmala Viatama

NPM. 1621020571



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Nurmala Viatama

Npm : 1621020571

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Siyasah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara)

Judul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wewenang
Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan
Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kota Bandar Lampung
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Drs.H. M. Wagianto, S.H., M.H.

NIP. 196201111994031001

Dr.Hj.Nurnazli, S.H.,S. Ag., M.H

NIP. 197111061998032005

Mengetahui
Ketua Jurusan

Frengki,M.Si

NIP. 198003122009011017

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung ? dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta analisis berdasarkan fiqh siyasahnya.

Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan atau kepada responden khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis atau objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta keterkaitan antara unsur-unsur mengenai objek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung mempunyai acuan yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya. Kendala yang dialami yaitu mengenai mekanisme penjatuhan sanksi dan kualitas sumber daya manusia, hambatan juga berasal dari kurangnya pemahaman terhadap Perda Kota Bandar Lampung serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional. Solusi yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menatai kendala tersebut dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung dan melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada penegak hukum.

Berdasarkan Analisis fiqh siyasah yang didalamnya terdapat ajaran Agama Islam yang mengajarkan kebaikan demi ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dalam Q.S An-Nisaa' -58 Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Diantara tugas dan wewenang tugas dan wewenang Satpol PP yakni mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Aparat Satpol PP belum memberikan pelayanan yang baik dalam melaksanakan perannya dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* yakni dalam prinsip fiqh siyasah yang semestinya ditegakan yakni prinsip menyelenggarakan keadilan, prinsip musyawarah, serta prinsip hak asasi manusia.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama:

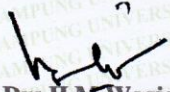
Nama : Nurmala Viatama
Npm : 1621020571
Jurusan : Siyasa (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
Judul : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

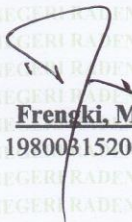
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005

Mengetahui
Ketua Jurusan


Frengki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)" Disusun oleh : **Nurmala Viatama, NPM : 1621020571, Jurusan : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Pada hari Kamis, 13 Februari 2020.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H (.....)
Sekertaris : Ahmad Fauzan, M.Sy (.....)
Penguji Utama : Drs.H.Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M (.....)
Pembimbing I : Dr.Drs.H.M.Wagianto, S.H., M.H (.....)
Pembimbing II : Dr.Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)

Dekan



Dr. H. Khairuddin, M.H

P. 196210221993031002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(Q.S An-Nisaa(4) : 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta untuk Ayahku Yakub dan tentunya Ibuku Ernani atas ketulusan mereka mendidik dan merawatku sejak dalam kandungan sampai aku sebesar ini. Berkat ketulusan doa keduanyaah penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga gelar yang aku dapatkan akan menjadi kebanggaan bagi kedua orangtuaku.
2. Kepada adikku Ahmad Yusuf yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Kepada Bapak Dr.Drs.H.M Wagianto,S.H.,M.H dan Dr.Hj.Nurnazli,S.H., S.Ag.,M.H. yang telah sabar membimbing dan memberi pengarahan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Allen Justine Pratama yang telah membantu, meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesahku, mendukung dan menyemangatiku serta memberikan arahan kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Nurkarisma Dewi, Peni Pebriyanti, Fiky Amalia, Putri Zairina, Ambar Veronicha, Muhammad Fuad Hasan, Muhammad Firmansyah, Deswan Saperly, Icha Rachma dan semua yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kalian yang selalu memotivasiku dan membantuku dalam setiap keadaan.
6. Sahabat-sahabaku Friends Until Jannah (Ade Okta, Sindika Adelia, Meilania Putri, Sagita Rahma, Inayah, Sayma dan Tya).
7. Teman-temanku satu angkatan 2016 di Siyasah H terimakasih karena kalianlah masa kuliah ku berarti dan penuh warna.
8. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nurmala Viatama, Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung 03 November 1999, Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yakub dan Ibu Ernani.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD N 01 Teladas kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010 kemudian melanjutkan studi di SMP N Satu Atap 1 Dente Teladas Tulang Bawang Lampung yang di selesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah) Fakultas Syariah

Bandar Lampung, 3 Desember 2019

Nurmala Viatama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, Yang maha kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hudayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”Sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Siyasa Syari’yyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasa Syar’iyyah Fakultas Sariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yongky Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung.

5. Kepada Bapak Dr.Drs.H.M Wagianto,S.H.,M.H dan Dr.Hj. Nurnazli,S.H., S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan daerah provinsi Lampung atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang di butuhkan.
8. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung beserta staf-staf jajarannya yang telah meberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini
9. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Ayahanda Yakub dan Ibundaku Ernani yang selalu memberikan doa, perhatian, dan dukungannya, serta kasih sayang dan semangat kepadaku.
11. Saudara-saudariku tercinta, yang selalu meberikan dukungan dan semangat kepadaku
12. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah maha adil, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Siyasah Syari'yyah.

Bandar Lampung, 3 Desember 2019

Penulis,

Nurmala Viatama

NPM 621020571

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	18
1. Asas-Asas Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Perundang- Undangan	18
a. Asas Desentralisasi.....	27
b. Asas Dekonsentrasi	30
c. Asas Tugas Pembantuan	33
2. Peraturan Daerah.....	33
a. Pengertian Peraturan Daerah.....	33
b. Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	39
c. Proses Penyusunan Peraturan Daerah.....	43

d. Peraturan pelaksana Tugas dan Wewenang Satpol PP Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan ketertiban umum	48
e. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah	51
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat	53
B. Tinjauan Pustaka	64

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	69
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung ...	69
2. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	70
3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	75
B. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	76
C. Tata Kerja Susunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	94

BAB IV ANALISIS

A. Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Fiqh Siyasah	95
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Perda di Kota Bandar Lampung	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Rekomendasi	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nmor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Lampiran 2 Blanko Konsultasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Satpol PP
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol



DAFTAR TABEL

Tabel 1	
Penelitian Eka Novianti Pertiwi	64
Tabel 2	
Penelitian Sulistyo Ardhi Wibowo	65
Tabel 3	
Penelitian Delfin Mikhael Meliala.....	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)*” Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan istilah atau kata-kata yang penting dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan agar tidak menimbulkan kesalah fahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; kupasan mengenai suatu soal.¹
2. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri²

¹J.C.T. Simorangkir, Rudi Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) h. 8.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Prenadamedia Group,2014) h.4.

3. Tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, perintah untuk membuat atau melaksanakan sesuatu, fungsi, jabatan.³
4. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁴
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁵
6. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.⁶

Berdasarkan beberapa penegasan, maka yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu studi yang mendeskripsikan tentang tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung berdasarkan Fiqh Siyasah. (*Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung*) adalah suatu kajian mengenai suatu kewenangan yang dimiliki sebuah perangkat daerah yang

³Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta: Palanta, 2007), h. 610.

⁴Partemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1560.

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1)

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat (5).

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berfungsi untuk menegakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diatur oleh peraturan daerah dan dianalisis berdasarkan perspektif Fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain :

1. Alasan Objektif

- a. Karena Indonesia adalah negara hukum dimana segala tindakan masyarakat yang melanggar akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang ditekuni, yaitu Siyasah
- b. Tersedianya berbagai literatur yang menunjang untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, Fungsi nya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Melihat dari fungsinya yang sangat penting tersebut, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.⁷

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatnya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka pada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.⁸

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Perda sangat penting untuk mengatur warganya untuk menjadi warga negara yang tertib dan sadar hukum membantu penegak hukum dalam bidang terutama yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Menurut Ryaas Rasyid, diantara tantangan yang paling serius adalah berkenaan dengan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah peningkatan kepemimpinan daerah untuk secara kreatif dan optimal mendayagunakan kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah nasional seperti yang terperinci dalam PP

⁷Ryaas Rasyid, *Pesentralisasi dan Otonomi Daerah :Otonomi Daerah Latar Belakangdan Masa depannya*, (Jakarta: Lipi Press,2007) h.12.

⁸Ateng Syarfudin,*Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*,Cet.II,(Badung:Mandar Maju,1991)h.7.

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.⁹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat peralatan penegakan hukum mempunyai konotasi penegakan melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan proses penegakan hukum dalam kenyataan yang memuncak pada pelaksanaan oleh pejabat penegak hukum itu sendiri¹⁰

Penegak hukum merupakan yang secara konkret adalah berlakunya hukum dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan in concreto dalam mempertahankan dan menjamin serta ditaatinya hukum.¹¹

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja didalamnya terdapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan aparat

⁹Ibid h.13

¹⁰Yunasril Ali,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta:Sinar Grapika,2007) h. 48.

¹¹Dellyana.Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Balai Pustaka,2008)h.32.

pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Sehubungan dengan adanya Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum maka perlu dilandaskan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum secara terencana dan terpadu.

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang mantap di daerah, perlu diadakan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengaruh serta pegadilan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

Memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, Sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, menyadari bahwa laju pembangunan dimasa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar dapat memenuhi kepentingan pemerintah daerah serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang pengaturan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan alat-alat perlengkapan negara dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan, yang disebut hubungan hukum. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah diatur oleh berbagai ketentuan terutama ketentuan hukum khususnya hukum administrasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis. Keberadaan Satpol PP makin dirasakan ditengah-tengah masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum sering kali harus berhadapan dengan masyarakat, badan hukum, dan bahkan aparatur yang tidak memahami Perda maupun kewenangan Satpol PP sebagai penegak Perda dan penyelenggara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di masa media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk dalam masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Adanya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban

umum. Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja diamanahkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Al-Nisa (4) Ayat 58.

﴿إِنَّا أَوْفَوْنَا كَلِمَتَنَا إِلَىٰ أَوْلِيَٰهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ أَوْفَىٰ عِزِّكُمْ بِئْسَ الْفِتْنَىٰ ۚ إِنَّ أَوْفَىٰ عِزِّكُمْ بِئْسَ الْفِتْنَىٰ ۚ﴾
نِعْمًا يَعِظُكُم بِهَا إِنَّا كَانُوا سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹²

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung. Hal ini mengingat betapapun idealnya tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda, Tetapi pada tataran pelaksanaannya belum tentu sesuai antara yang seharusnya dengan fakta yang sesungguhnya, maka pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda belum efektif atau belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

¹²CV. Al Hanan, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Surakarta : 2009), h. 87.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu :

1. Bagaimana tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha untuk bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tentang analisis fiqh siyasah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai hazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum islam dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata negara.
- c. Untuk menambah refrensi bahan literatur atau pustaka khususnya dalam memahami kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda di Kota Bandar Lampung berdasarkan fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi.
- b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi di fakultas syariah dan hukum.
- c. Diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan penegakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹³ Menurut Kartini kartono, metode penelitian adalah : “cara berfikir dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*). Menurut Kartini Kartono, Penelitian lapanganyaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Penelitian lapangan

¹³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VII, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 24.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 15.

¹⁵*Ibid.*, h. 32.

bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok dan lembaga masyarakat.¹⁶ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.

2. Desain Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta keterkaitan antara unsur-unsur mengenai subjek yang diteliti.

Lebih lanjut Winarno Sukarmad menyatakan bahwa metode penyelidikan deskriptif lebih tepat untuk menjelaskan data pada waktu sekarang.¹⁷

Menurut Amirrudin dan Zainal Asikin, Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

3. Partisipan dan tempat penelitian

Partisipan dan tempat penelitian adalah darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi

¹⁶Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000),h.5.

¹⁷Winarno Sukarmad,*Pengantar Penelitian Ilmiah "Dasar, Metode dan Teknik"*.Ed.7,Cet.VII,(Bandung:Tarsito,1990), h.29.

¹⁸Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.I, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004), h.25.

menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder yang diperoleh melalui langka *library research*, yaitu buku-buku yang relevan dengan skripsi ini, dan *field research* atau penelitian lapangan, Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data primer dan data skunder.

- a. Data primer yaitu data pokok dalam penelitian yang langsung diperoleh melalui data lapangan. Yakni data yang diperoleh di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung melalui ketua, sekretaris dan anggota Satuan polisi Pamong Praja kota Bandar Lampung.
- b. Data sekunder yaitu data penunjang dari data primer yang diperoleh melalui buku-buku dan dokumen maupun lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, Seperti Peraturan daerah dan Peraturan perundang-undangan.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁹ Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁰ Observasi yang dilakukan yaitu dengan

¹⁹Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.58.

²⁰*Ibid.* h.154.

menamati tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Metode Interview

Menurut Margono, metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara menyajikan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.²¹ Sedangkan menurut Mardalis, Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²²

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelaslah bahwa interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) dengan pihak terkait mengenai pengaturan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja di kota Bandar Lampung.

Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah pihak yang terkait yang berkompeten, yaitu : Pimpinan Kantor Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung (Kepala atau Sekretaris Satpol PP Kota Bandar Lampung), Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban umum, Kepala

²¹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka cipta 2004), h.165.

²²Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal* Cet.VII,(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 64.

seksi penegakan peraturan daerah di Kota Bandar Lampung, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terkait dengan penelitian ini dan beberapa orang anggota yang bertugas dilapangan.

Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten di kantor Polisi Pamong Praja dan masyarakat guna memenuhi kevalidan penelitian, Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari informasi Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung pada pihak yang berprofesi sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan ditinjau dari pandangan fiqh siyasah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang terbentuk tulisan,²³ atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang bersumber dari dokumen berupa catatan, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, asati, notulen rapat dan sebagainya.

d. Focus Group Discussion

Focus group discussion adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Focus group discussion dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Perda Kota Bandar Lampung

²³*Ibid* h.46.

5. Prosedur Analisis Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis induktif.

Metode induktif, yakni analisis yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁴ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan Analisis fiqh siyasah terhadap tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dikota Bandar Lampung.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan

²⁴Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradikma, 2015), h.58.

cara menggunakan lebih dari satu orang dalam penumpulan dan analisis data.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Asas-Asas Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Asas Desentralisasi

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik.²⁶

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintah yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal *Local government*, disana terjadi "...a "superior" government one encompassing a large jurisdiction-assigns responsibility, authority, or function to 'lower' government one encompassing a smaller jurisdiction-that is assumed to have some degree of autonomy. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasa 1 Ayat (5)

²⁶ Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Depok :Fakultas syari'ah, 2010), h. 199.

rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.

Menurut Henry Maddick, desentralisasi mencakup proses desentralisasi dan devolusi, merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perbedaan ini muncul dari pemaknaan terhadap istilah dari desentralisasi itu sendiri. Para pakar politik berpendapat bahwa dianutnya desentralisasi adalah agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat setempat.²⁷

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.²⁸ Amrah muslimin mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah

²⁷ *Ibid.*, h. 195.

²⁸ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung : Alumni, 1986), h.5.

pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Pasal 1 butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 7, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, menurut Koswara mengemukakan bahwa pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Prakarsa untuk menentukan prioritas, memilih alternatif, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya, baik dalam hal menentukan kebijaksanaan, perencanaan, maupun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Demikian pula hak yang menyangkut pembiayaan dan perangkat pelaksana, baik

personel maupun alat perlengkapan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab daerah yang bersangkutan. Proses desentralisasi ini juga berlaku bagi Pemerintah Daerah Tingkat I terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II.

Desentralisasi merupakan cara sebuah rezim atau negara untuk menghadirkan suatu sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah lokal (daerah) untuk terlibat aktif dalam merespon hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun daerah, di pusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagai kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Desentralisasi ketatanegaraan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu Desentralisasi teritorial (*territoriale decentralisatie*), adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom) dan desentralisasi fungsional (*funcionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Dalam desentralisasi semacam ini dikehendaki agar kepentingan-

kepentingan tertentu di selenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri. Kewajiban pemerintah dalam hubungan ini hanyalah memberikan pengesahan atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh golongan-golongan kepentingan tersebut.²⁹

Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi, (2) delegasi kelembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah (*parastatal*), (3) pelimpahan kewenangan (*devolusi*) ke pemerintah daerah, dan (4) peralihan fungsi dan lembaga-lembaga negara ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan konitum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi, akan mengakibatkan disintegrasi. Oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan keluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan

²⁹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 47.

pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi yang bersifat saling berbalasan (*resiprokal*).

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, dan lebih produktif.

Meskipun penilaian terhadap memperlihatkan catatan-catatan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak ke arah desentralisasi yang lebih luas atau ke arah pendelegasian pelaksanaan pembangunan. Data-data memang tidak memungkinkan penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, namun kondisi-kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program-program desentralisasi dapat diketahui dengan pasti.

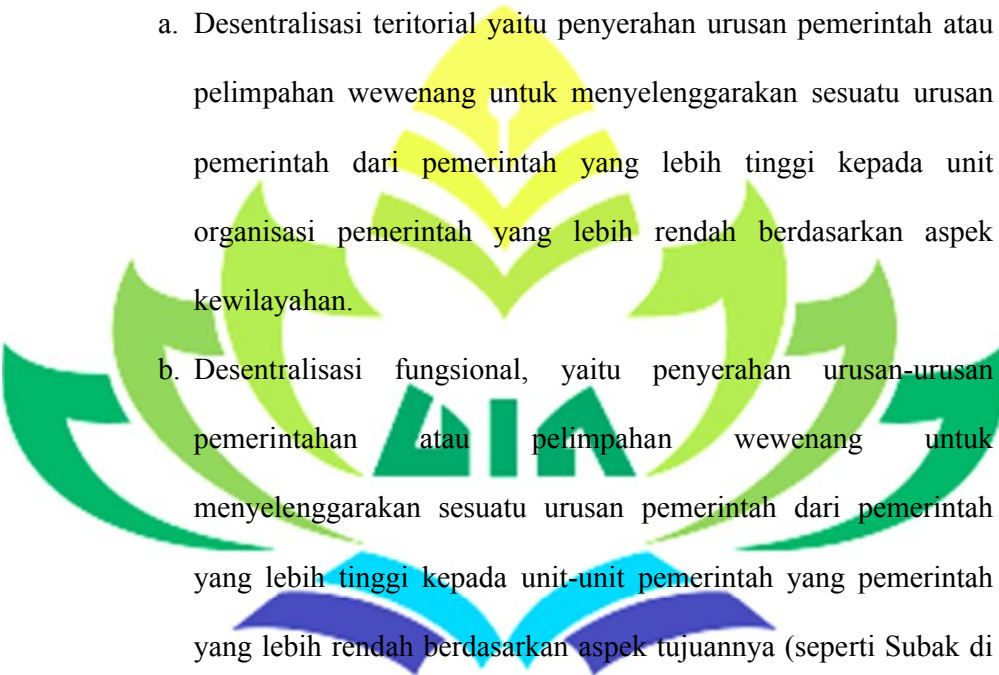
Kelemahan-kelemahan potensial pada sistem administrasi pemerintah yang terlalu sentralistik biasanya harus diimbangi dengan sistem yang lebih desentralistik, dengan memperluas wewenang atau otonomi pemerintah lokal.

Setiap negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi, dapat sepenuhnya dilaksanakan dalam dan dari pusat pemerintahan (*single centralized government*) atau oleh Pusat bersama-sama organnya yang dipancarkan di daerah-daerahnya. Sentralisasi yang disertai pemancaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah Pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisatie met deconcentratie*). Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggara pemerintahan tidak semata-mata dilakukan dalam pemerintah pusat (*central government*), melainkan dalam kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (*zelfstanding*), bersifat otonomi (teritorial ataupun fungsional).

Desentralisasi bukan sekedar pemancaran kewenangan tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah. Dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna adanya pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan

kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan hal yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.³⁰

Pada hakikatnya, desentralisasi itu sendiri dapat di bedakan dari segi karakteristiknya, yaitu

- 
- a. Desentralisasi teritorial yaitu penyerahan urusan pemerintah atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan sesuatu urusan pemerintah dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit organisasi pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek kewilayahan.
 - b. Desentralisasi fungsional, yaitu penyerahan urusan-urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan sesuatu urusan pemerintah dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit-unit pemerintah yang pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek tujuannya (seperti Subak di Bali).
 - c. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk mengurus diri kepentingan rumah tangga yang dipilih oleh rakyat. Ini terkait juga dengan desentralisasi tutorial.
 - d. Desentralisasi budaya itu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaan

³⁰*Ibid.* h.10.

sendiri. Misalnya, kegiatan pendidikan oleh kedutaan besar negara asing, otonomi nagari dalam menyelenggarakan kegiatan kebudayaan sendiri, dan sebagainya. Dalam hal ini sebenarnya tidak termasuk urusan pemerintah daerah.

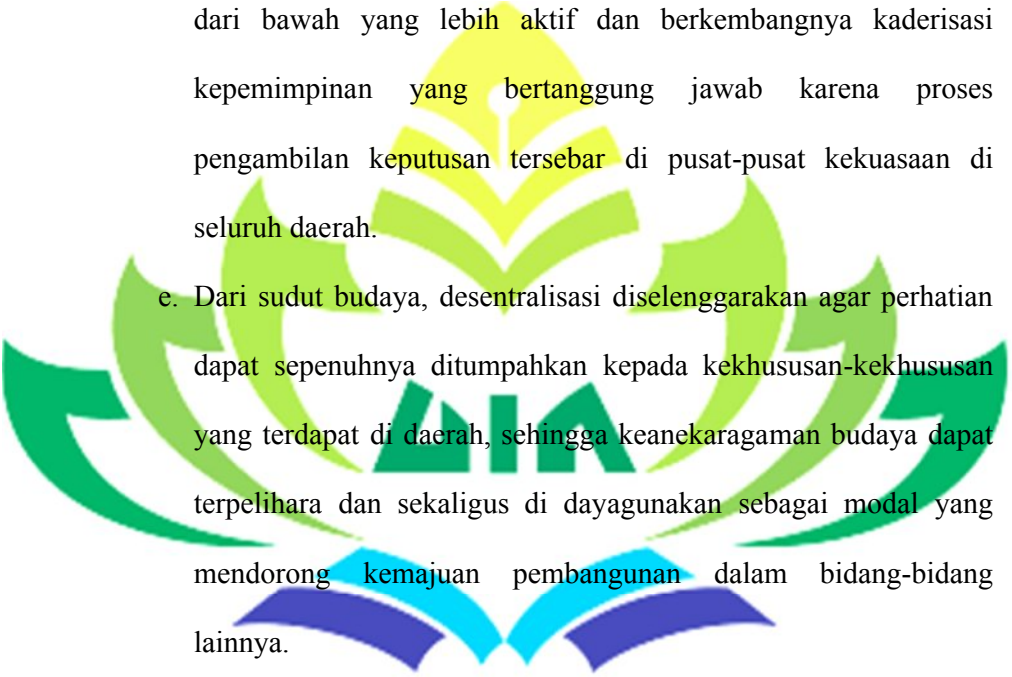
e. Desentralisasi ekonomi yaitu pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi.

f. Desentralisasi administratif yaitu pelimpahan sebagai kewenangan kepada alat-alat atau unit pemerintahan sendiri di daerah, pengertiannya identik dengan dekonsentrasi.

Keenam karakteristik desentralisasi tersebut dapat diterapkan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi yang ada pada pokoknya merupakan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kecenderungan terjadinya penumpukan kekuasaan di satu pusat kekuasaan. Di samping itu, dengan kebijakan desentralisasi dan konsentrasi juga diharapkan dapat terwujud fungsi-fungsi kekuasaan negara yang efektif dan efisien, serta menjaminnya dari sistem pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi dan bersifat sentralistik.

Oleh karena itu, ada beberapa tujuan dan manfaat yang bisa dinisbatkan pada kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi itu, yaitu

a. Dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan (*concentration of power*) dan pemusatan kekuasaan (*centralised power*) yang dapat menimbulkan tirani.

- 
- b. Dari sudut politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian kegiatan pemerintah.
 - c. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
 - d. Dari segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggung jawab karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di seluruh daerah.
 - e. Dari sudut budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat di daerah, sehingga keanekaragaman budaya dapat terpelihara dan sekaligus di dayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya.
 - f. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, karena pemerintahan daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan di daerah, maka dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan lebih tepat dan dengan biaya yang lebih murah.

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.³¹

Desentralisasi administratif (dekonsentrasi) adalah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni pejabat-pejabat Pemerintah yang ada di daerah, untuk dilaksanakan.³²

Amrah muslimin mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejinto mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 1 huruf (f), dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.³³ Asas dekonsentrasi didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dipandang bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap asas

³¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat (5).

³² *Ibid.*

³³ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Pasal 1 Ayat (6).

desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dari penegasan ini semakin memperkuat penilaian masyarakat bahwa spirit yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah adalah sentralistik. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 huruf (f) ditegaskan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.³⁴ Pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Penegasan ini memperlihatkan bahwa spirit yang dibangun oleh Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah Tahun 1999 adalah desentralistik sehingga di daerah kabupaten/kota tidak ada urusan yang sifatnya dekonsentrasi. Melalui Undang-undang ini instansi vertikal di daerah kabupaten/kota dihapuskan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 8 mengartikan, dekonserasi adalah pelimpahan wewenang pmerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (6).

oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.³⁵

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu : (1) dari segi wewenang: asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat bawahnya; (2) dari segi pembentuk pemerintah : berarti pembentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah; (3) dari segi pembagian wilayah : asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

c. Asas Tugas Pembantuan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.³⁶

Asas tugas pembantuan berarti pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (5).

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (5).

yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan tugas sendiri (*zelfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah atasan yang bersangkutan.³⁷

Di samping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, kita dapat juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu “*medebewind*” yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zulfuitvoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.

Menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (tugas *medenewind*, sertatantra). Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, disini urusannya bukan menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggarannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah

³⁷Khairudin, Iwan Satriawan,
Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Depok :
Rajawali Pers, 2018), h.115.

lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaraannya saja.

Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah, dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut "*de opgedragen taak*" atau tugas yang diperintahkan, yang menurut ketentuan dalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintah Daerah disebut tugas pembuatan atau yang telah secara populer disebut orang *serta-tantra*, *medebewind* atau *selfo vernment*, yakni tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah kepada pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan untuk dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschiken*).³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Pasal 1 huruf (d), yang dimaksud tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah desa oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawaban kepada yang

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 313.

menugaskannya.³⁹ Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 9, dinyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁴⁰

2. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.⁴¹

Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.⁴²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari

³⁹Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Pasal 1 Ayat (4).

⁴⁰Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 314

⁴¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (7).

⁴²*Ibid*, Pasal 1 Ayat (10).

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁴³

Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan materi substansi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah memiliki hak yuridiksi setelah di undangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Peraturan Daerah juga dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal. Meskipun tata urutannya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan daerah (Perda) itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Akan tetapi, dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Peraturan daerah itu mirip dengan Undang-Undang, Seperti Undang-Undang maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika Undang-Undang dibentuk oleh lembaga legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan Presiden selaku pemerintahan eksekutif, maka

⁴³ *Ibid*, Pasal 136.

⁴⁴ Dr.H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.37.

peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintah daerah setempat. Dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang, peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat berdaulat.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menentukan “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, agar berlaku mengikat umum, rancangan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah yang bersangkutan, harus diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dinilai sebagaimana mestinya. Melalui mekanisme demikian, produksi peraturan daerah oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia akan tetap terkontrol dengan baik, sehingga pemerintah pusat dapat bertindak apabila timbul kendala yang tidak menguntungkan kepentingan nasional ataupun kepentingan antar daerah yang terkait sebagai akibat terbitnya berbagai peraturan daerah yang tidak saling menunjang upaya pembangunan daerah dan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁴⁵

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), h. 66.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani-serta Pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya pelaksanaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakan hukum dengan Undang-Undang 22 Tahun 1999

disebut “pelaksanaan penegakan hukum” atau “pelaksanaan pemeliharaan hukum”

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴⁶

Peraturan Daerah (termasuk peraturan desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam penyajiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan”, melainkan juga pada “lingkungan wewenangnya”. Suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintah Daerah.⁴⁷

Pasal 3 ayat 7 ketetapan MPR No.III/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan daerah (Perda) sudah secara resmi menjadi sumber hukum dan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Di

⁴⁶ Deddy Supriyadi Bratakusumah, Ph. D Dadang Solihin, MA, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 20.

⁴⁷ Jamiz Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), h.35.

dalam Pasal 3 ayat (7) tap tersebut ditegaskan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan, sesuai dengan tata uruta peraturan perundang-undangan ini, maka seriap urutan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.⁴⁸

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah 4, Sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan suatu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kota dan provinsi antara lain :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. APBD;
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- f. Perangkat Daerah;
- g. Pemerintahan Desa;
- h. Pengaturan Umum Lainnya.

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h.83-84.

b. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga di dasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:

a. Kejelasan Tujuan.

“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

“Bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.”

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

“Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.”

d. Dapat dilaksanakan.

“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.”

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

f. Kejelasan rumusan.

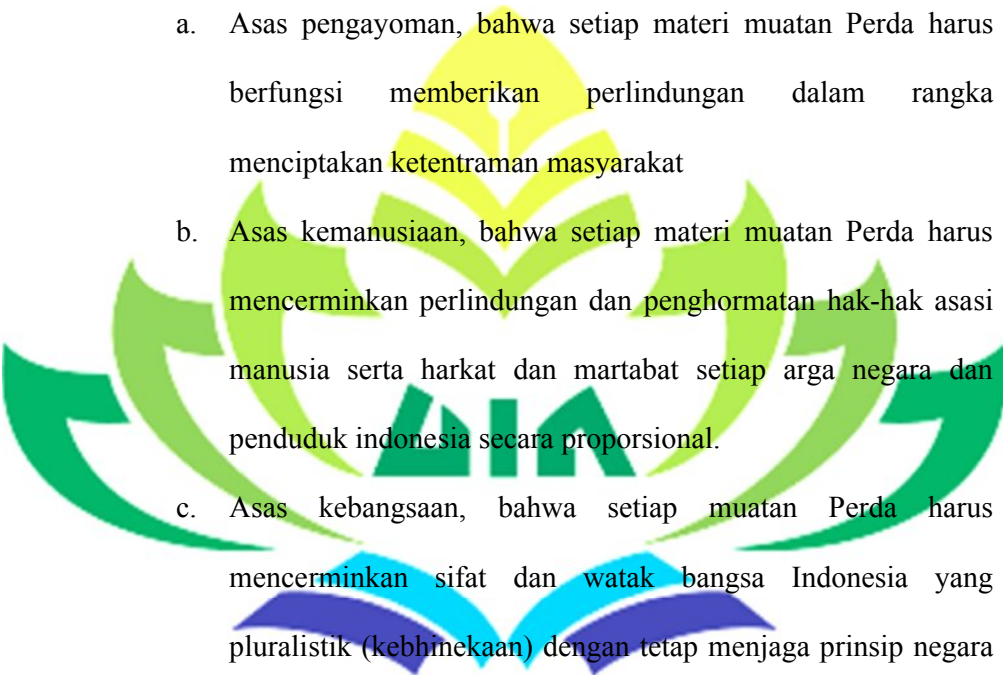
“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mematuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

g. Keterbukaan.

“Bahwa dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian

seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.”⁴⁹

Materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 
- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
 - b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah

⁴⁹ Sasmita, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah* (Jakarta :Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., 2009), h. 14.

Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khusus yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- k. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.⁵⁰

⁵⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 138.

Selain asas dan materi muatan diatas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya.

c. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Proses penyusunan peraturan daerah dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya partisipan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut

kedalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangka kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapan. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah akademik (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekeretaris Daerah.

Ketiga proses pembentukan Perda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Proses penyiapan Perda di lingkungan DPRD

Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR

berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang Begitu pula tingkat daerah. DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/bagian Hukum.

b. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dalam proses penyiapan perda yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2006.

c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa

tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna.

Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD di tentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

d. Proses Pengesahan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.

e. Lembaran Daerah dan Berita Daerah

1. Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat. Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus di undangkan dalam Lembaran Daerah.
2. Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya. Penjelasan atas perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan diatas.

Pejabat yang berwenang mengundang Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.⁵¹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan dinyatakan bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah “asas keterbukaan” (huruf g) yang selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: “dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan”.

Implementasi dari asas keterbukaan adalah dalam bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 (Rancangan) Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10

⁵¹Kartasapoetra Misdayanti, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1003), h.18.

Tahun 2004 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Bahwa:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap penyiapan rancangan Perda.
2. Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
3. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
4. Masukan dari masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat.⁵²

d. Peraturan Pelaksana Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan rasa aman, tenteram, dan terlindungi. Terutama segala yang berkaitan dengan

⁵²*Ibid*, h. 16.

hubungan atau interaksi terhadap sesama, sekitar dan komunitasnya, setiap manusia memiliki kepentingan namun jika kepentingan itu salah sasaran maka dapat merugikan atau bahkan membahayakan orang lain. Negara sebagai payung tempat masyarakat berteduh wajib memberikan solusi dan melindungi segala kepentingan masyarakat agar tidak mengganggu dan saling merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu adanya ketertiban umum sangatlah penting untuk masyarakat demi terlindungi dan membuat rasa tenteram dari sekitar kita.⁵³

Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menjadi Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara Pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung menjelaskan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam rangka

⁵³<http://www.arahman.or.id/index.php?option=comconnect&view=article&id=91:kejahatan-dan-pelanggaran-terhadap-ketertiban-umum&catid=56:artikel-rw-12&Itemid=78> diakses pada 10 Oktober 2019 13:35.

mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kota Bandar Lampung dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 2 diatur, Bahwa kedudukan seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja langsung bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁵⁴

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tenteram, nyaman, sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan msyarakat yang cerdas, modern, dan religious.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Limnas adalah satuan kerja prangkat daerah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.⁵⁵

⁵⁴Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 2.

⁵⁵Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 1 Ayat (6).

Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kota bandar Lampung dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan perlindungan masyarakat seluruh warga Kota Bandar Lampung.

Kewenangan ini perlu mendapat kontrol dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dengan demikian pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut harus diterapkan dalam Perda Kota Bandar Lampung.

e. Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;

- d. melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepada daerah.⁵⁶

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Pengawasan erhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁶*Ibid.*h.20

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;⁵⁷

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Masyarakat

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Rida, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa “Islam adalah agama yang serba lengkap”. Didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya

⁵⁷Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5 dan 6.

dalam bernegara umat islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.

Secara bahasa Fiqh berasal dari *faqaha-yafqaha-yafqafu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” fiqh sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara; untuk dapat di amalkan oleh umat Islam. *Fiqh* mencakup seluruh aspek kehidupan, baik mencakup hukuman antara manusia dengan tuhan (ibadah), dan mencakup hubungan antara sesama manusia luas (*Muamalah*).

Sedangkan kata “*Siyasah*” berasal dari kata sasa yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian siyasah secara etimologis : “*Siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menerapkannya dan Allah tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.”⁵⁸

Metode kajian Fiqh siyasah atau siyasah syar’iyah tidak jauh beda dengan metode mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih, yaitu : *qiyah, istihsan, ‘urf, maslahah mursalah, istihbab*. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi *Fiqh siyasah* adalah suatu

⁵⁸Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), h.9.

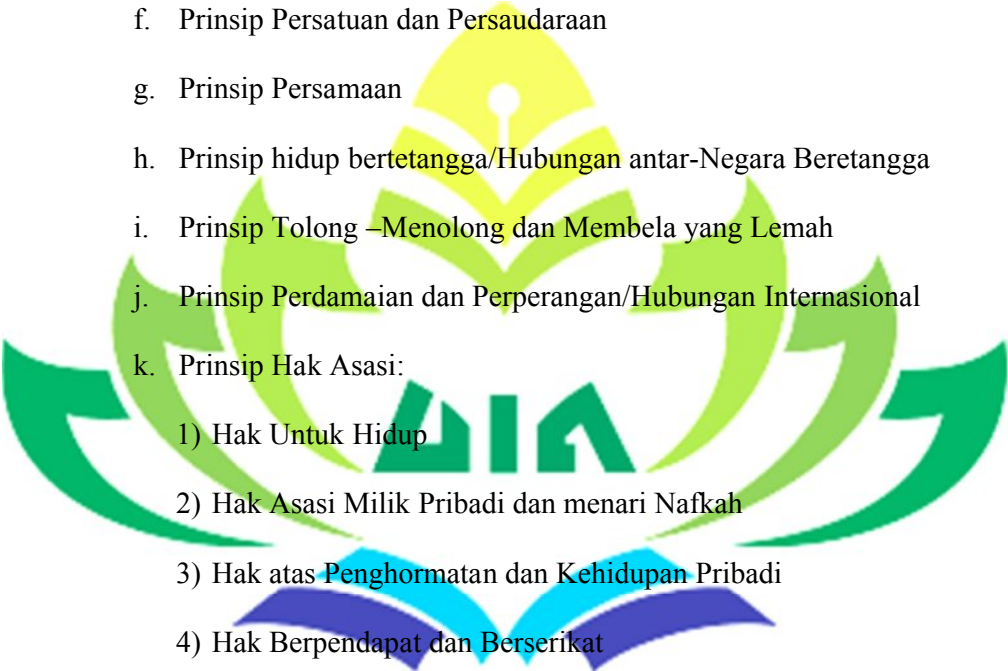
ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara : meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan, peradilan, kriminal, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum internasional. *Fiqh siyasah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan pemerintahan.⁵⁹

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah *maslahah mursalah*, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai. Demikian pada As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan rinci mengenai prosedur pengertian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat, dikemukakan beberapa Firman Allah dan Sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ihwal *fiqh siyasah syar'iyah*, baik langsung maupun tidak langsung.⁶⁰

⁵⁹ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet 5 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.27.

⁶⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h.3.

- 
- a. Kedudukan Manusia di atas Bumi
 - b. Prinsip Manusia Sebagai Umat Yang Satu
 - c. Prinsip Menegakan Kepastian Hukum dan Keadilan
 - d. Prinsip Kepemimpinan
 - e. Prinsip Musyawarah
 - f. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan
 - g. Prinsip Persamaan
 - h. Prinsip hidup bertetangga/Hubungan antar-Negara Beretangga
 - i. Prinsip Tolong –Menolong dan Membela yang Lemah
 - j. Prinsip Perdamaian dan Perperangan/Hubungan Internasional
 - k. Prinsip Hak Asasi:
 - 1) Hak Untuk Hidup
 - 2) Hak Asasi Milik Pribadi dan menari Nafkah
 - 3) Hak atas Penghormatan dan Kehidupan Pribadi
 - 4) Hak Berpendapat dan Berserikat
 - 5) Hak Kebebasan beragama, Toleransi Agama dan Hubungan antar pemeluk Agama
 - 6) Hak Persamaan di depan Hukum dan Membela Diri
 - 7) Hak Kebebasan dari Pengniayaan
 - 8) Hak Kebebasan dari Rasa Takut
 - 9) Prinsip Amal Makrif dan Nahi Munkar
 - 10) Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksanaan Suatu Urusan

Beberapa pendapat di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip nomokrasi Islam atau genus yang tepat untuk istilah bagi negara yang tunduk dan taat pada aturan hukum Islam yakni sebagai berikut:

a. Prinsip kedudukan manusia di bumi

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai Khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (QS. Al-Baqarah, 2: 30) Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memeliharanya dari kehancuran.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۢ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.⁶¹

b. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya (QS. Al-Nisa', 4: 58). Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

⁶¹CV. Al Hanan, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta : 2009), h. 6.

﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نِعَمَّا بِكُمْ بِهِ إِنَّ أَوَّلَ مَا كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya:“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁶²

c. Prinsip penegakan keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menegaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *al-wazn/al-mizan*, *al-qisth*, dan *as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami goncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah suratan-nisa, 4:135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ ۖ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآؤِلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ أَوَّلَ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۚ ١٣٥﴾

⁶²Ibid, h. 87.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap Ibu Bapak dan kaum kerabatmu.”⁶³

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak dapat membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.

d. Prinsip musyawarah

Musyawarah disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an ayat, yaitu Ali'Imran (3):159



فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنِتَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya :“Maka berkat rahmat Allah engkau (muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”⁶⁴

Ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian

⁶³CV.Al Hanan, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta : 2009), h. 58.

⁶⁴*Ibid* h. 65

hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam demokrasi Islam yang potensinya hanya setingkat di bawah kewajiban shalat.

e. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Dalam hal ini Allah swt meletakkan kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya, pada suratan-Nisa, 4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶⁵

f. Prinsip Persaudaraan dan persatuan

Dalam surat Ali'Imran 3:103 Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman.

اَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

⁶⁵Ibid h.87.

Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu kepada semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.⁶⁶

g. Prinsip perdamaian.

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam hubungan dengan umat lain (QS.al-Anfal, 8:61).

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١﴾

Artinya : “Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁶⁷

h. Prinsip *amar ma'rufnahu munkar*.

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. (QS. Ali'Imran, 3:110)

﴿نُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠﴾

⁶⁶Ibid h.64

⁶⁷Ibid h.189.

Artinya : “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.⁶⁸

Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukan sesuatu yang tabu dalam **nomokrasi** Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

- i. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan.

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan promordial atau kekerabatan. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat.

Dalam Al-Qur'an surat *al-Qasas*, 28:26,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجِرَّةُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya : *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai Ayahku! Jadilah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang-orang yang paling baik yang*

⁶⁸*Ibid* h. 63.

*engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang kuat dan dapat dipercaya.*⁶⁹

melalui kisah Nabi Musa a.s., Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

j. Prinsip penegakan HAM.

Prinsip nomokrasi Islam dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah 5: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ ۝ ٣٢

Artinya : “Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bai Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi banyak diantara mereka yang melampaui batas di bumi”.⁷⁰

Penegakan hak asasi manusia ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non-

⁶⁹Ibid h. 388.

⁷⁰Ibid h. 113.

Islam. Salah satu hak asasi manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama.⁷¹

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1

Penelitian Eka Novianti Pertiwi

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Eka Novianti Pertiwi (2014) dengan judul “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar”	Untuk mengetahui wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar	Metode Deskriptif Normatif	Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah di kota Makassar spil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah daerah Kota Makassar yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana bak dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional.

Sumber : Eka Novianti Pertiwi, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Tabel 2

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h.240.

Penelitian Sulistyo Ardhi Wibowo

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Implementasi Tugas Dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi	Untuk mengeahui implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi oleh Satpol PP	Metode Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis	Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi oleh Satpol PP Kab. Bantul dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Satpol PP. Faktor penghambat yang terjadi dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang reklame dan media Informasi diantaranya keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi.

Sumber : Sulistyo Ardhi Wibowo, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Tabel 3

Penelitian Delfin Mikhael Meliala

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Delfin mikhael meliala (2013) dengan judul Analisis yuridis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2005 (Studi kabupaten Simalungun).	Untuk mengetahui bagaimana Satpol PP dalam meningkatkan Profesionalisme nya dan mengetahui bagaimana prosdur tetap (PROTAP) oprasional Satpol PP	Metode Analisis Kuantitatif	Untuk dapat menghasilkan aparat Satpol PP yang professional, maka upaya yang dapat dilakukan adalah memantapkan wawasan, keterampilan, dan performance SDM Satpol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satpol PP dan menjalin kerja dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Sumber : Delfin Mikhael meliala, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2003.

Keterangan:

- 1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka novianti pertiwi.**

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka novianti pertiwi yakni sama-sama meneliti kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah.

Perbedaannya terletak pada masalah yang akan diteliti, Peneliti menganalisis wewenang serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan dalam penelitian Eka novianti pertiwi meneliti hanya meneliti kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan mencari faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar. Peneliti menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Sulistyio ardhi wibowo.

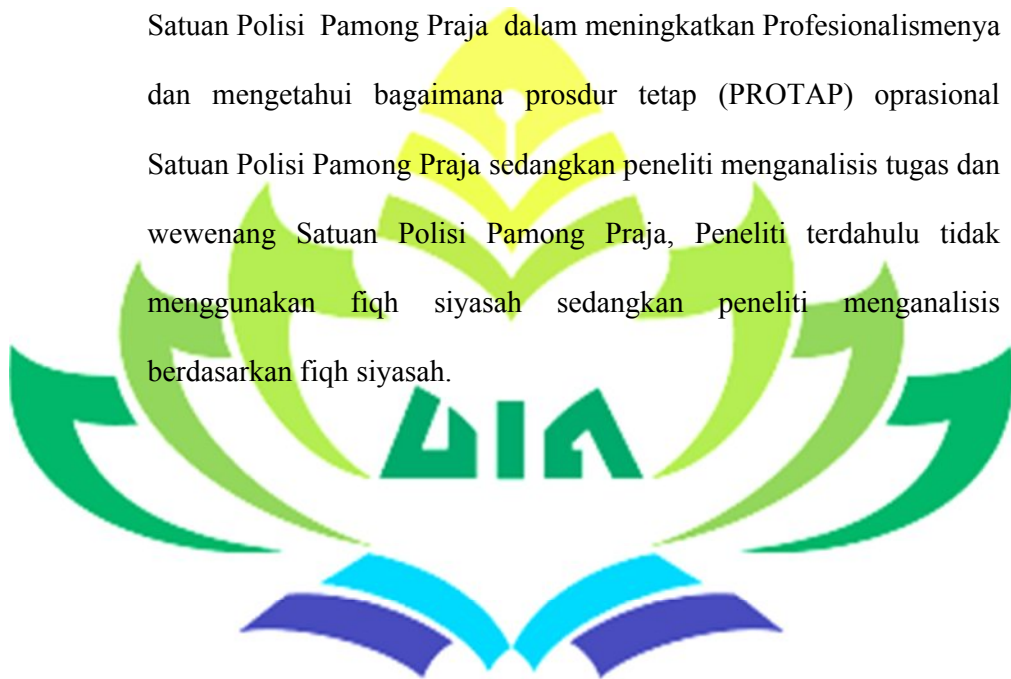
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyio ardhi wibowo adalah sama-sama membahas tentang tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

Perbedaannya penelitian terdahulu menganalisis implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan peneliti menganalisis tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menegakan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam tetapi peneliti menggunakan hukum Islam.

3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Delfin mikhael meliala.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Delfin Mikhael Meliala adalah sama sama menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum..

Perbedaannya peneliti terdahulu mencari upaya bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan Profesionalismenya dan mengetahui bagaimana prosdur tetap (PROTAP) oprasional Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan peneliti menganalisis tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, Peneliti terdahulu tidak menggunakan fiqh siyasah sedangkan peneliti menganalisis berdasarkan fiqh siyasah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an :

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro: 2006.

B. Buku :

Ammirruddin dan H.Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung : Alumni, 1986.

Ateng Syarfudin *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*.Cet.II, Bandung: Mandar Maju, 1991.

Deddy Supriyadi Bratakusumah, Ph. D Dadang Solihin, MA, *Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Dellana Shant *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Balai Pustaka, 2008.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Palanta, 2007.

Jamiz Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008.

Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014.

J.C.T. Simorangkir, Rudi Erwin, J.T Prasetyo *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Kartini Kartono *PengantarMetedologi Riset Sosial*,Cet.VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Khairudin, Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok : Rajawali Pers, 2018.

Mardalis *Metedologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Moh.Nazir *Metodelogi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Muhammad Iqbal *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Ni'matul Huda *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : FH UII Press, 2007.

Partemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ryaas Rasyid *Pesentralisasi dan Otonomi Daerah :Otonomi Daerah dan Latar Belakang dan Masa depannya*, Jakarta: Lipi Press, 2007.

Sarundang *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Sasmita, *Panduan Praktis Memahami Rancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Direktorat Jendral Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.

Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Cet V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Siswanto Sunarno *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

S.Margono *Metode Penelitian Pendidikan* , Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Winarno Sukarmad *Pengantar Penelitian Ilmiah “Dasar, Metode, dan Teknik”*.Cet VI, Bandung: Tarsito, 1990.

Yunasril Ali *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grapika, 2007.

Zuhraini *Tata Nagara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Amanemen*, Depok :Fakultas Syariah, 2010

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Keteriban Umum

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013.

D. Skripsi :

Eka Novianti Pertiwi, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2003.

Delfin Mikhael Meliala, Analisis Yuridis Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2005 (Studi Kabupaten Simalungun), Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2003.

Sulistyo Ardhi Wibowo, Implementasi Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bantul Dalam Penegakan Perda Kab. Bantul No.20 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

E. Wawancara :

Agustam, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 5 November 2019

Paryanto, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 5 November 2019.

Wisnu, Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 5 November 2019.